

RINGKASAN

SUNGGU SITUMORANG. Dampak Kebijakan Pungutan *Crude Palm Oil* terhadap Harga Tandan Buah Segar Tingkat Petani. Dibimbing oleh AMZUL RIFIN dan BUNGERAN SARAGIH.

Saat ini Indonesia menjadi negara dengan areal kelapa sawit terluas dan produsen CPO terbesar di dunia. Luas areal menurut status pengusahaannya milik rakyat (perkebunan rakyat) seluas 4,55 juta Ha atau 41,55% dari total luas areal, milik negara (PTPN) seluas 0,75 juta Ha atau 6,83% dari total luas areal, milik swasta seluas 5,66 juta Ha atau 51,62%, swasta terbagi menjadi 2 (dua) yaitu swasta asing seluas 0,17 juta Ha atau 1,54% dan sisanya lokal. Dengan potensi lahan yang cukup besar ini, industri minyak kelapa sawit Indonesia menjadi negara pengekspor CPO terbesar di dunia. Produksi CPO setiap tahun meningkat terus, tidak diimbangi dengan kenaikan ekspor CPO, sementara konsumsi dalam negeri tidak ada peningkatan yang mengakibatkan harga CPO menurun yang selanjutnya berdampak kepada masyarakat melalui harga TBS (tandan buah segar) semakin anjok. Penurunan harga CPO yang konstan sejak tahun 2014 akibat *oversupply* CPO, penurunan harga minyak bumi, dan tekanan dari barang substitusi yaitu *soybean oil* membuat industri kelapa sawit seolah-olah akan mengalami krisis pada tahun 2015. Untuk meningkatkan harga CPO yang terus menurun, maka pemerintah mengeluarkan satu kebijakan *Crude Palm Oil Supporting Fund* (pungutan atas ekspor CPO dan turunannya) melalui PP No 61 tahun 2015.

Penelitian ini berfokus kepada harga tandan buah segar (TBS) tingkat petani, karena kebun kelapa sawit milik petani di Indonesia saat ini cukup luas yang memberikan kontribusi besar sebagai bahan baku untuk industri yang menghasilkan CPO. dan adanya penurunan harga CPO akan berdampak terhadap menurunnya harga TBS pada tingkat petani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak *pungutan CPO* terhadap harga TBS tingkat petani dan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang nyata antara sebelum dan sesudah adanya. Dengan adanya pungutan berapa besar beban yang ditanggung oleh petani demikian juga produsen CPO.

Penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda. Hal ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing – masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dengan model yang dibangun dinyatakan hipotesa penelitian dan uji t atau uji beda dua rata-rata yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara harga ketika ada pungutan (*without*) versus harga setelah adanya pungutan (*with*). Analisis uji beda dilakukan pada harga TBS dan harga CPO.

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh pungutan sawit (baik bea keluar maupun *CPO Supporting Fund*) berpengaruh negatif terhadap harga TBS, dimana setiap kenaikan pungutan sawit sebesar Rp 1/kg, maka harga TBS akan turun sebesar Rp 0.066/kg. Hal ini menunjukkan bahwa pungutan sawit mengakibatkan harga TBS di tingkat petani menurun, dan mengakibatkan kerugian bagi petani. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t statistik sebesar 2.807, sedangkan nilai t statistik pada alpha 5% adalah 1,988. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pungutan sawit terhadap harga TBS adalah signifikan pada alpha 5%, dimana nilai

t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau $2.807 > 1.998$). Hal ini juga tercermin pada nilai *Prob-t* sebesar 0.007 atau lebih kecil dari alpha 5%. Harga TBS tidak responsif terhadap perubahan pungutan sawit, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dengan nilai elastisitas jangka pendek 0.006 dan nilai elastisitas jangka panjang sebesar 0.009. Keduanya bersifat inelastis, karena nilai elastisitas kurang dari 1. Hal ini memberi makna bahwa harga TBS tidak dapat melakukan penyesuaian maupun respon terhadap perubahan pungutan, karena pungutan merupakan sebuah kebijakan pemerintah dan wajib dipatuhi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, dimana pengenaan pungutan sawit (bea keluar) tidak elastis baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang (Purba 2012).

Penelitian ini juga mendukung hipotesa bahwa pungutan CPO yang diberlakukan berdampak negatif bagi petani. Hal ini terlihat dari koefisien peubah (variabel) pungutan yang memiliki tanda negatif dan signifikan. Berdasarkan data rentang waktu penelitian, dampak pungutan ekspor CPO dapat dibagi dalam 3 bagian, yakni (a) Bea Keluar pada periode Januari 2011 s/d Desember 2014); Bea keluar berpengaruh negatif terhadap harga TBS, dimana setiap kenaikan pungutan sawit sebesar Rp.1/kg, maka harga TBS turun sebesar Rp.0,018/kg dan (b) pemberlakuan pungutan CPO Fund pada periode Juli 2015- Juni 2016 berpengaruh positif terhadap harga TBS, dimana setiap kenaikan CSF sebesar Rp.1/kg, maka harga TBS akan naik sebesar Rp. 0,820/kg. Namun tidak signifikan karena $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$. (c) periode September 2014 s/d Juni 2015 dimana bea keluar dan CSF adalah 0.

Pada periode pemberlakuan bea keluar (BK), rata-rata harga TBS di eksportir adalah Rp 1,695.76/kg (dikonversi dari harga CPO), sedangkan harga TBS di petani adalah Rp 1,315.07/kg, sehingga terdapat margin eksportir sebesar Rp 348,8/kg. Sedangkan pada periode pemberlakuan CSF, rata-rata harga TBS di eksportir adalah Rp 1,860.15/kg, sedangkan harga TBS di petani adalah Rp 1,533.07/kg, sehingga terdapat margin sebesar Rp 380.70/kg. Pada periode tanpa BK dan CSF belum diberlakukan (Agustus 2014 - Juni 2015), terlihat rata-rata harga TBS di eksportir adalah Rp 1,687.53/kg, sedangkan harga TBS di petani adalah Rp 1,593.78/kg, sehingga terdapat margin sebesar Rp 93.75/kg (untuk meng-cover biaya yang ditanggung eksportir).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pungutan sawit tersebut (baik BK dan CSF), dibebankan kepada petani, dan mengakibatkan petani menerima harga yang rendah. Besarnya margin pada saat pemberlakuan BK adalah Rp 348,8/kg, dan pada periode CSF adalah Rp 380.70/kg, sedangkan margin pada periode tanpa pungutan adalah Rp 93.75/kg. Dari sisi persentase, juga terlihat bahwa pungutan sawit pada periode CSF lebih besar dibandingkan dengan periode BK, dimana besarnya margin eksportir pada periode CSF adalah 31 %, dan pada periode BK adalah 24 %. Hal ini menunjukkan, kerugian yang dialami petani relatif lebih besar pada periode CSF dibandingkan dengan periode BK.

Kata kunci: BK, CPO, CPO fund, TBS, pungutan,